



SUMBER BERITA

<input checked="" type="checkbox"/>	RAKYAT BENGKULU	MEDIA INDONESIA
	BENGKULU EKSPRESS	KOMPAS
	RADAR BENGKULU

KATEGORI BERITA UNTUK BPK

POSITIF NETRAL BAHAN PEMERIKSAAN PERHATIAN KHUSUS

Audit Pengelolaan Keuangan OPD

BENGKULU - Temuan tiga kali berturut-turut di DPRD Kabupaten Bengkulu Utara masuk dalam audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Bengkulu kembali dipertanyakan. Tahun 2019, 2020 dan terakhir 2021. Diantaranya kelebihan pembayaran atas realisasi belanja makan minum pada pimpinan DPRD BU Rp 354,94 juta.

Berulangnya temuan di DPRD Bengkulu Utara ini menurut Aktivistis Pusat Kajian Anti Korupsi (Puskaki) Bengkulu, Sony Taurus, menjadi preseden buruk bagi kelembagaan legislatif. DPRD seharusnya menjadi penyambung aspirasi masyarakat, malah disinyalir menyalahgunakan anggaran. Aparat penegak hukum harus objektif dalam pengusutannya.

"Temuan uang makan dan minum pimpinan DPRD BU ini sangat memprihatinkan. Puskaki berharap ini diusut," kata Sony.

Temuan berdasarkan LHP-LKPD. Dalam dokumen LHP 2021 tersebut, Sekretariat DPRD BU telah menganggarkan belanja barang dan jasa Rp 23,4 miliar dengan realisasi Rp 21,05 miliar atau 89,79 persen. Diantaranya terdapat realisasi atas belanja bahan isi tabung gas Rp 13,14 juta. Serta realisasi atas belanja natura dan pakan natura (makan/minum) Rp 1,12 miliar. Belanja tersebut merupakan belanja bahan-bahan untuk kebutuhan rumah tangga pimpinan DPRD, yaitu Ketua, Wakil Ketua I dan Wakil Ketua II.

"Temuan BPK, realisasi belanja natura dan pakan natura Rp 1,12 miliar termasuk PPN Rp 102,48 juta. Namun berdasarkan hasil pemeriksaan belanja rumah tangga Ketua, Wakil Ketua I dan Wakil Ketua adalah Rp 666,89 juta. Sehingga terdapat kelebihan pembayaran Rp 357,94 (Rp 1,02 miliar-Rp 666,89 juta)," bunyi audit BPK tersebut.

Di tahun yang sama, BPK juga menemukan kesalahan perhitungan PPh atas belanja pegawai khusus anggota DPRD pada Sekretariat DPRD Kabupaten BU. Sehingga kurang bayar Rp 74,8 juta.

Kasi Penkum Kejati Bengkulu, Ristianti Andriani SH.MH dikonfirmasi belum berkomentar banyak. Pihak Kejati Bengkulu belum menerima adanya laporan tersebut. "Coba koordinasi langsung dengan Kasi Intel Kejari Bengkulu Utara dahulu," kata Ristianti.

Kasi Intel Kajari Bengkulu Utara Denny Agustian, SH, MH yang RB hubungi melalui pesan WhatsApp mengatakan pihaknya telah menerima bukti setor pengembalian dari DPRD BU mengenai temuan tersebut. "Terkait berita temuan tersebut, pihak DPRD sudah memberikan fotocopy bukti setor atas tindak lanjut temuan BPK kepada kita," singkat Denny.

Sebelumnya Ketua DPRD Bengkulu Utara Sonti Bakara, SH tak menampik dengan adanya temuan yang tertuang dalam LHP BPK. Ia memastikan kepatuhan dalam mengikuti rekomendasi BPK. "Kita menyadari ada beberapa temuan. Namun dengan temuan tersebut kita patuh mengikuti saran yang tertuang dalam LHP tersebut," ujarnya.(jam)